KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Bahas RUU SDI, baleg usul bentuk badan pengelola data nasional
Tanggal : Kamis, 09 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bahas RUU SDI

Baleg Usul Bentuk Badan Pengelola Data Nasional

BADAN Legislasi (Baleg) DPR mengusulkan pembentukan badan otoritatif pengelola data nasional dalam pembahasan RUU Satu Data Indonesia (SDI). Lembaga itu akan mendukung tugas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui data yang terintegrasi.

Ketua Baleg DPR Bob Hasan menjelaskan, integrasi data dasar nasional harus dipahami sebagai alat baku agar informasi menjadi valid melalui sistem yang terpadu. Badan otoritatif yang diusulkan ini nantinya menghimpun data berbagai kementerian atau lembaga. Langkah itu bertujuan menghasilkan rujukan akurat bagi perencanaan pembangunan nasional.

Bob menilai, perencanaan pembangunan berpotensi tidak akan tepat sasaran jika Bappenas hanya menggunakan satu perspektif data saja. Karena itu, SDI berfungsi melakukan orkestrasi data dari kementerian atau lembaga yang melakukan pendataan di tiap sektor. Proses itu meliputi pengumpulan, pengelolaan, hingga penyimpanan.

Penguasaan data, sambung Bob, tetap berada pada instansi terkait dan hasilnya jadi rujukan bagi badan otoritatif baru. Tapi nantinya, data berada di bawah Bappenas untuk menghasilkan keterpaduan informasi yang akurat dan mutakhir. "Sehingga, data bisa dipertanggungjawabkan serta mudah diakses pihak berkepentingan," katanya, kemarin.

Senada, Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan, peluang badan baru sebagai pusat pengelolaan SDI masih dikaji secara mendalam. Konsep awal yang masuk ke Baleg menyebut, aturan itu membangun sistem orkestrasi. Berdasarkan peraturan presiden yang berlaku saat ini, Bappenas-lah yang berperan jadi pengorkestrasi utama.

Menurut Doli, RUU SDI harus jadi momentum bagi Indonesia untuk mengintegrasikan data dari semua kementerian maupun lembaga. Harus ada kesepakatan mengenai lembaga yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Pasalnya, selama ini informasi berserakan di banyak instansi, sehingga penyatuannya harus dilakukan secara menyeluruh.

Doli menyebut, Baleg DPR masih mengkaji berbagai pertimbangan terkait pihak yang akan menjadi pusat pengelolaan satu data nasional. Sembari menimbang pembentukan badan baru, pihaknya juga menggodok apakah lembaga tersebut berdiri sendiri atau melekat pada institusi yang ada.

Dia menjelaskan, pembahasan satu data terintegrasi sempat disinggung dalam draf awal RUU Statistik. Untuk itu, perlu ada pendalaman mengenai pihak yang bertanggung jawab mengelola data itu. "Diskusi saat ini fokus pada siapa yang mengumpulkan data, metodologi yang digunakan, serta pertanggungjawaban akhirnya," terangnya.

Wakil Ketua Baleg DPR Martin Manurung menambahkan, pembentukan badan supervisi independen yang bekerja harian untuk mengawasi data sangat mendesak. Pasalnya, integrasi informasi dalam RUU SDI harus bisa digunakan bagi pembangunan. ■ PYB